

**“Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di
Polsek Panakkukang”**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Syariah dan Hukum**

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAIMIN MALABA

NIM: 10500113065

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhaimin Malaba

NIM : 10500113065

Tempat/Tanggal Lahir : Labalawa, 21 Oktober 1994

Jur/Prodi/KonsentrasI : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Fakultas/Program : Syari`ah dan Hukum

Alamat : BTN Tamarunang Indah II Blok D7/18

Judul : “Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada
Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang”

Menyatakan dengan sesungguhnya dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 25 Februari 2021

Penyusun

Muhaimin Malaba

Nim : 10500113065

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang”** yang disusun oleh Muhaimin Malaba, NIM. 10500113065, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 24 November 2020 M

09 Rabiul Akhir 1442 H

Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hj. Rahmatiah, HL. M.Pd	(.....)
Munaqasyah I	: Dr. Hamsir S.H, M.H	(.....)
Munaqasyah II	: St. Nurjannah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ashabul Kahfi, S.Ag., M.H	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.

NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehendak Allah swt atas segala nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang”** yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menghamparkan permadani-permadani Islam.

Membuat skripsi bukanlah hal yang mudah dan ringan untuk dilakukan, melainkan tugas yang berat dan membutuhkan banyak pengorbanan baik tenaga, biaya dan waktu. Penulisan skripsi ini bukanlah merupakan hasil tunggal, melainkan tidak terlepas dari pemikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu terimah kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda **Asma** dan Ayahanda **La Kaige (Almarhum)** yang telah mencurahkan segenap doa, restu, kasih sayang serta segala bentuk pengorbanannya yang tidak dapat dibayar dengan apapun. Apa yang diberikan saat ini hanyalah segelintir ucapan terima kasih dan kasih sayang yang tidak dapat terbendung lagi dan sesungguhnya penulis tidak akan pernah mampu untuk membalas kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan.

Begitu pula saudaraku, kakak pertama **Haima**, kakak kedua **Liyudi**, kakak ketiga **Rusima**, kakak keempat **Arson**, dan kakak kelima **Susi** yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat dalam menyusun skripsi ini dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan serta

doa yang tulus demi kesuksesan selama pelaksanaan proses kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun doa. Karena itu terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhanis M.A, Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil rektor, dan seluruh staff UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan kepada kami sebagai mahasiswa.
2. Bapak **Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc.,M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak **Dr. Rahman Syamsuddin, SH.,M.H.** dan Bapak **Abdul Rais Asmar, S.H.,M.H.** masing- masing selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Bapak **Dr. Fadli Andi Natsif, S.H.,M.H** dan Bapak **Ashabu Kahfi, S.Ag.,M.H.** masing- masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi, serta memberikan banyak pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pembahasan ini.
5. Bapak **Dr. Hamsir, S.H.,M.Hum** dan Ibu **St. Nurjannah, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan banyak sekali masukan dan saran sebagai bahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Staff Pegawai yang telah membantu dalam kelancaran akademik.
7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta staffnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang di butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepala Kepolisian Sektor Panakkukang serta jajaran pengurus yang membantu dan memberikan izin dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan.
9. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Teman-teman Angkatan Ilmu Hukum 2013, karena mereka, sehingga mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Kawan-kawan di **SIMPOSIUM** dan **LKBHMI Cabang Gowa Raya**, yang selalu mendoakan, menghibur, memberikan support, memberi motivasi serta mewarnai kehidupan penulis hingga sekarang.

Semoga Allah swt. Senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya.

Upaya penulisan skripsi ini telah dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu mohon saran atau kritikan dari pembaca untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin.

Samata, Juli 2021

Penulis

Muhaimin Malaba



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	xv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II.....	16
A. Hak Asasi Manusia.....	16
B. Hak-Hak Tersangka dalam KUHP.....	25
C. Penyidikan.....	32
BAB III.....	39
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	42
G. Pengujian Keabsahan Data	43
BAB IV	44
A. Pengaturan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang.....	44
B. Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang.....	50
BAB V	63

DAFTAR PUSTAKA	65
----------------------	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ٲ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ز	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah</i> dan yā'	Ai	a dan i
او	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Tā' Marbū'ah

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu transliterasinya dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasydid* ّ(), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ىber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah(ىّ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ى(alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalāl (جلال)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Adapun *tā' marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalāl* ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.



ABSTRAK

NAMA : MUHAJIMIN MALABA
NIM : 10500113065
JURUSAN : Ilmu Hukum
JUDUL : Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai implementasi pemenuhan hak tersangka pada tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik (aparatus kepolisian). Adapun sub-sub masalah terdiri atas 1) bagaimana pengauran hak tersangka pada tingkat pemeriksaan? 2) bagaimana implementasi pemenuhan hak tersangka pada tingkat pemeriksaan?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan bersifat deksriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder dari buku, ataupun jurnal. Pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data menggunakan indentifikasi data dan editing data.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan bahwa 1) Pengaturan hak-hak tersangka pada dasarnya memang telah diatur didalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi hak tersangka juga dijamin kedudukannya di dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang turunannya terkait dengan Perkap No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik. 2) Implementasi pemenuhan hak tersangka pada tingkat pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang belum terpenuhi dengan baik. Masih adanya praktik-praktik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara-cara yang membentak, terjadi kekerasan fisik, tersangka yang diancam hukuman lima tahun atau lebih tidak mendapatkan penasehat hukum.

Adapun saran dari penelitian ini adalah 1) Mendorong adanya peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Sebab masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. 2) Perlu adanya peningkatan sikap, mental dan sikap

profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang berbasis pada prinsip Hak Asasi Manusia.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1998 terjadi reformasi. Reformasi dianggap perlu dikarenakan sistem pemerintahan pada saat itu yang biasa disebut dengan rezim Orde Baru, berwatak otoriter. Terjadi krisis multidimensi, sistem politik dan hukum pada masa itu berjalan sangat tidak demokratis. Pemerintah Orde Baru bersifat sewenang-wenang, relasi kekuasaan terjebak dalam patron-client, pemerintah pusat yang berpuncak pada Soeharto sangatlah determinan dan sangat sentralistik.

Krisis multidimensi tersebut yang menjadi cikal bakal terjadinya reformasi dan pintu masuk untuk membangun sistem politik yang demokratis. Dasarnya, hanya dengan sistem demokratislah rakyat memiliki kesempatan untuk secara bersama-sama menentukan haluan negara dan menentukan cara-cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi secara bersama dan melembaga secara bangsa.

Oleh sebab itu, demokrasi menjadi tuntutan utama pada saat reformasi dan untuk membangun demokrasi langkah yang dipandang sangat penting adalah dengan mengamandemen UUD 1945, sebab pembangunan sistem kekuasaan Orde Baru telah nyata-nyata dilakukan melalui celah-celah UUD 1945. Ada keyakinan akademik pada saat itu bahwa tidak mungkin membangun demokrasi tanpa mereformasi UUD 1945, sebab dengan adanya amandemen diharapkan sistem politik dan hukum dapat berubah menjadi demokratis sehingga kekuasaan menjadi proporsional dan hak asasi manusia bisa dilindungi.

Ketika rezim Soeharto lengser, muncul optimesme yang begitu kuat akan datangnya penegakkan hukum yang berkeadilan, jujur dan terbuka, yang jauh dari pengaruh kekuasaan atau jabatan. Dihapuskannya berbagai undang-undang yang bertentangan dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, wujudkan negara hukum yang demokratis, serta amandemen terhadap konstitusi atau UUD 1945 dengan melakukan perubahan terhadap substansi dan susunan pasalnya, menegaskan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum didalam batang tubuh¹, dan tidak hanya dalam penjelasan serta perluasan pasalmengenai HAM.

Akibatnya pemerintahan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto diperhadapkan terhadap tuntutan untuk penyelesaian masalah politik hukum dan HAM yang kompleks. Pemerintahan baru tersebut didesak untuk melakukan langkah-langkah yang tegas dan terarah untuk mengakhiri unsur-unsur kekuasaan otoritarian sebelumnya secara menyeluruh, untuk membuka jalan perubahan terhadap penegakkan hukum dan HAM.

Seperti kita ketahui dalam negara hukum yang demokratis, maka tentu diharuskan adanya sistem pembagian kekuasaan dengan perlindungan HAM yang diatur dalam konstitusinya. Di dalam konstitusi tersebut, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa adanya penegasan tentang batas kekuasaan serta adanya jaminan perlindungan hak-hak warga negara, hal ini dikarenakan konstitusi merupakan pondasi sebuah negara dan sebagai hukum tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh warga negaranya, "*Goverment by laws, not by men*".²

Hal itu juga dikemukakan oleh Jimly, bahwa membicarakan demokrasi tidak bisa dilepaskan dari HAM dan negara hukum. Dalam sebuah negara hukum,

¹ Lihat Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum.

²Miriam Budiardjo, *Dasar Ilmu Politik*, Cet. 18 (Gramedia Jakarta, 1997), h. 52.

sesungguhnya yang memerintahnya adalah hukum bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma yang terpuncak pada konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi (kontrak sosial).³

Implikasinya negara menjadi bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia.⁴ Hal itu tidak hanya sekedar dimaknai bahwa negara menjamin dalam keterlibatannya untuk aktif memproteksi HAM dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga terlibat aktif dalam melakukan tindakan apabila HAM dilanggar. Sebab, jika dalam suatu negara, HAM dilanggar dengan sengaja atau terabaikan dan memunculkan penderitaan yang tidak bisa diatasi secara adil, maka negara tersebut sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai negara yang berdasarkan hukum.

Terkait konsep suatu negara yang berdasarkan hukum yang biasa disebut dengan istilah *rechtsstaat* menurut F. Julius Stalh, Jimly Ashiddiqie, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, mencakup empat elemen penting, yaitu: perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.⁵

³Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi* (Setara Institute, 2015), h. 187.

⁴Lihat Bab XA Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012), h. 130.

Menurut Sri Soemantri, secara teori ciri-ciri negara yang berdasar atas hukum sekurang-kurangnya ada empat, yaitu adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara, adanya pembagian kekuasaan, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan terakhir adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugasnya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.⁶

Sedangkan Frans Magnis S, dalam bukunya Fajlurrahman Jurdi yang berjudul Teori Negara Hukum mengemukakan ciri negara hukum sebagai ciri demokrasi, yang terdiri dari: fungsi kenegaraan dijalankan sesuai UUD, UUD menjamin HAM, Badan negara menjalankan kekuasaan taat pada hukum yang berlaku, terhadap tindakan negara, masyarakat wajib mengadu ke pengadilan dan putusannya harus dilaksanakan badan negara; dan badan kehakiman harus bebas dan tidak memihak.⁷

Mengenai konsep negara hukum yang telah dikemukakan oleh dua tokoh tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan dasar yang harus dipenuhi dalam konsep negara hukum. Sehingga apabila kita membaca UUD 1945 baik pembukaan maupun pasal-pasal, maka akan ditemukan unsur-unsur negara hukum yang menurut konsep eropa kontinental disebut *rechtsstaat* dengan memuat ketentuan tentang perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia sebagai wujud konsep negara demokrasi.

⁶ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 312.

⁷Fajlurrahman Jurdi, *Negara Hukum* (Malang : Setara Press, 2016), h. 22.

Apabila kita membicarakan hak asasi manusia, pada umumnya, terutama di Barat, ada anggapan Piagam Magna Charta yang dibuat pada tahun 1215 sebagai konsep pertama hak asasi manusia. Akan tetapi apabila kita mau meneliti lebih dalam, lepas dari beriman atau tidak, maka harus diakui bahwa sebenarnya ada piagam yang dibuat pada masa Nabi Muhammad SAW pada abad ke VII yang di gali dari nilai-nilai Al-Quran. Inilah piagam pertama yang 6 abad lebih dulu dari Magna Charta.

Piagam tersebut adalah Piagam Madinah atau biasa juga disebut dengan Konstitusi Madinah, dalam pasal 25 disebutkan bahwa sebagai satu kelompok Yahudi bani Auf hidup berdampingan dengan kaum Muslimin. Kedua belah pihak memiliki agama masing-masing. Selain dari itu Pasal 26 sampai dengan Pasal 35 yang isinya merupakan jaminan kebebasan beragama bagi setiap kaum di Madinah dan hidup berdampingan secara damai.⁸ Al-Quran sendiri, banyak sekali menyebutkan tentang hak asasi manusia, Allah berfirman QS. Al-Maidah : 32

نُ أَجْلَ ذَا لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَا لِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahannya:

Siapa yang membunuh seseorang tanpa hak, atau melakukan kerusakan di muka bumi adalah seperti dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.⁹

⁸ Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta : UI Press, 1995), h. 84-87

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Darus Sunnah, 2015).

Allah berfirman QS. Al-An'am : 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahannya:

“Katakanlah; Marilah kamu, aku bacakan apa-apa yang diharamkan Tuhanmu atas kamu, (yaitu) janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatupun dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak; dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami memberi rezeki kamu dan mereka dan janganlah kamu hampiri perbuatan yang keji, baik yang lahir atau yang batin; dan janganlah kamu bunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak. Demikianlah Allah berwasiat padamu, mudah-mudahan kamu memikirkannya.”¹⁰

Ayat-ayat tersebut menunjukkan hak untuk hidup bagi manusia tanpa mengenal perbedaan, agama, ras ataupun bangsa. Bachtiar Surin dalam tafsirannya memberi makna bahwa memelihara kehidupan berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan. Alangkah tinggi nilai kemanusiaan dalam ayat ini.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh setiap orang yang beragama bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan semuanya mesti kembali kepada-Nya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan yang satu dengan yang lain, semua adalah sama. Sama-sama mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan, sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada tiap diri manusia.

¹⁰Bachtiar Surin, Adz Dzikra, *Terjemahan & Tafsir*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 542.

Dasar yang paling relevan digunakan dalam mengungkap konsep ini adalah manusia dilahirkan dengan derajat dan kehormatan yang sama, Allah berfirman QS. Al-Hujarat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Terjemahannya:

Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

Manusia sebagai hamba Tuhan, dan juga sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya. Sebagai makhluk Tuhan, setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusiaan yang menopang martabat harkat pribadinya, yang harus dilindungi tanpa tanpa kecuali. Setiap manusia ingin dihargai dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang manusia. Olehnya itu tidak ada seorang manusiapun yang mau diperlakukan untuk direndahkan kemanusiaannya.

Tidak seorangpun manusia sudi mendapatkan perlakuan yang berbeda dari manusia yang lain, baik dalam pemerintahan maupun dalam penegakan hukum. Tidak ada manusia yang mau diperbudak ataupun diperlakukan secara sewenang-wenang. Setiap manusia memiliki hati nurani sehingga perlakuan yang tidak manusiawi, akan tidak diterima. Makanya itu Pancasila, sebagai ideologi,

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : Darus Sunnah, 2015).
h. 518

pandangan hidup bangsa Indonesia memuat sila “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Secara substantif sila kedua tersebut menegaskan bahwa setiap manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang derajat, hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai HAM yang dimiliki setiap manusia tanpa membedakan keturunan, agama, suku, jenis kelamin, ataupun status sosialnya.

Pandangan atau paradigma tersebut merupakan keharusan dalam membangun sistem penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, mengatur prinsip-prinsip bagi lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya dalam mewujudkan tujuan negara.¹² Berdasarkan landasan itulah, seharusnya yang diwujudkan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi tersangka. Cara-cara yang manusiawi seperti itulah yang telah menjadi prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekalipun yang diperiksa adalah tersangka namun mereka sebagai manusia memiliki harkat dan martabat yang wajib dipenuhi dan lindungi serta tidak dapat diperlakukan dengan sikap dan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum.

Penyidik seharusnya menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) kepada setiap tersangka. Penyidikan seharusnya dilakukan dengan menempatkan seorang tersangka sebagai subjek (prinsip akuisitor) bukan sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor), karena itu tersangka harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukannya sebagai manusia yang

¹² Fadli Andi Natsif, “Pancasila dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia,” *Jurnal Jurisprudentie*, vol 4 no. 2 (2 Desember 2017), h. 125. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4057> (Diakses 10 Oktober 2020).

mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi.¹³

Untuk memberikan rasa kepastian hukum terhadap tersangka, khususnya didalam proses penyidikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menentukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap tersangka, namun hal tersebut tidak dapat terealisasi dalam pelaksanaannya, dikarenakan penyidik dalam pemeriksaan terhadap tersangka sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasar hukum. Hal demikian dilakukan oleh penyidik sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan secara mudah dari tersangka. Tentu tindakan seperti demikian tidak berdasar pada prinsip due process of law.

Hal demikianlah yang menandakan adanya dugaan bahwa implementasi hak-hak tersangka pada proses pemeriksaan di kepolisian secara umum belum terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan secara khusus juga diduga bahwa hak-hak tersangka tersebut belum diimplementasikan sepenuhnya pada proses pemeriksaan di Kepolisian Sektor Panakkukang Kota Makassar yang akan menjadi lokasi penelitian penulis.

Dari uraian itulah yang menjadi alasan penulis untuk mengkajinya lebih mendalam lagi terkait perlindungan hukum hak-hak tersangka yang telah diatur dalam KUHAP yang dalam pelaksanaannya tidak dipenuhi oleh penyidik. Maka dari itu penulis, tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : **“Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan Di Polsek Panakkukang”**.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h. 134.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terkait dengan implementasi pemenuhan hak-hak tersangka pada tingkat pemeriksaan di Polsek Panakkukang beserta hambatan pemenuhannya.

2. Deskripsi Fokus

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi seseorang akan dilakukan pemeriksaan baik sebelum ditetapkan menjadi tersangka ataupun setelahnya, hal ini (pemeriksaan) dilakukan agar penyidik bisa mendapatkan keterangan, kejelasan dan keindentikan tersangka atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur pidana yang terjadi, sehingga kedudukan seseorang ataupun tersangka tersebut menjadi jelas.

Tetapi dalam sistem pemeriksaan tersebut, tersangka memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka harus diterapkan asas praduga tidak bersalah dan semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Hal itu adalah sebahagian saja dari prinsip yang telah diamanahkan oleh konstitusi dan terkhusus KUHAP sebagai pijakan dalam proses penegakkan hukum pidana yang harus dipedomani dan jiwai oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, deskripsi fokus dalam skripsi ini lebih fokus pada aspek yuridis (KUHAP).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Polisi Sektor Panakkukang?
2. Bagaimana implementasi hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan momen yang tepat bagi peneliti untuk menyampaikan hasil bacaannya dengan seluas-luasnya terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan menjadi objek penelitiannya. Tujuannya agar sipeneliti bisa mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang terpenting dan bisaberkontribusi secara akademik dari penelitiannya pada waktu dan tempat tertentu.¹⁴

1. Dr. Leden Marpaung dalam buku *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, 2009. Membahas mengenai proses atau penanganan perkara yang dimulai dari tahap mencari atau mengumpulkan bukti untuk menentukan tersangka atau terdakwa. Setelah itu membahas mengenai orang-orang yang terlibat dalam memprosesan atau penanganan perkara pidana yakni, penyelidik, penyidik, penuntut umum, hakim beserta segala sesuatu yang dilakukakannya.
2. Ruslan Renggong dalam bukunya *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, 2014. Membahas mengenai hukum acara pidana terkait aspek perlindungan hak

¹⁴Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 13.

asasi manusia dalam proses penahanan di Indonesia, dan juga peran aparat penegak hukum sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana.

3. Munir Fuady dan Sylvia Laura, dalam bukunya *Hak Asasi Tersangka Pidana*, 2015. Membahas tentang ketidakmampuan tersangka, terdakwa ataupun terpidana walaupun dalam undang-undang telah dijamin perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, baik secara universal, ataupun yang dalam hukum Indonesia, seperti hak untuk diam, hak untuk didampingi penasehat hukum, hak-hak Miranda, hak untuk tidak dihukum karena aturan yang berlaku surut, hak untuk tidak disiksa, anti pemidanaan diri, hak untuk di hukum dengan hukuman yang kejam, penerapan prinsip asas praduga tidak bersalah, dan banyak lagi hak tersangka lainnya yang masih terpasung dalam teori apalagi praktik dalam penerapannya di Indonesia.
4. Hartono, dalam bukunya *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, 2012. Membahas tentang penerpan hukum yang benar dalam pengertian penegakan hukum publik termasuk dalam mengungkap kasus dan menyusun sistematika pembuatan berita acara pemeriksaan baik terhadap tersangka, saksi maupun ahli agar dengan langkah ini (pendekatan hukum progresif) dapat dicapai hasil maksimal menurut kebutuhan hukum yang sesungguhnya yang mampu menjaga wibawa hukum di Republik ini.
5. OC. Kaligis, dalam bukunya *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, 2006. Membahas tentang hak-hak asasi yang bersifat mutlak, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM terkait hak untuk tidak

disiksa, hak hidup, hak kebebasan berpikir, hak untuk memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, hak persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut dengan aturan hukum yang berlaku surut. Berbagai HAM tersebut, diantaranya diidentifikasi sebagai problem, selanjutnya diulas kembali secara ilmiah dan menarik sebagai awal untuk memahami sistem peradilan di Indonesia yang dapat memberikan perlindungan hukum atas hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terkait pengaturan hak-hak tersangka baik yang diatur dalam ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan ketentuan lainnya.
- b. Untuk memastikan implementasi hak-hak tersangka yang telah diamanatkan oleh KUHAP berkesesuaian dengan apa yang diterapkan oleh penyidik di Kepolisian Sektor Panakkukang. Dan jika tidak, apa saja yang menjadi hambatannya.

2. Kegunaan

Setiap peneliti berharap hasil penelitiannya dapat memberikan kontribusi tentang apa yang menjadi objek penelitiannya. Maka hasil dari penelitian ini, penulis (peneliti) berharap dapat memberikan sumbangsih pemahaman terkait pemenuhan hak-hak tersangka pada tingkat pemeriksaan. Adapun secara spesifik kegunaannya:

- a. Kegunaan Secara Teoritis diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pikiran terkait pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik.
- b. Kegunaan Secara Praktis dapat memberikan informasi dan masukan bagi mahasiswa, aparat penegak hukum, masyarakat, dan tersangka itu sendiri untuk lebih jauh memahami permasalahan dan penyelesaian terkait dengan hak-hak tersangka sebagai suatu penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Hak Asasi Manusia*

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM) sesungguhnya dapat dikatakan sama dengan awal keberadaan manusia di muka bumi. Mengapa dikatakan demikian, dikarenakan hak asasi manusia selalu memiliki sifat yang melekat dalam diri setiap manusia, sehingga keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia.

Berbagai upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan nyata, sejak dahulu hingga sampai sekarang ini tercermin dari perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa yang tiran. Timbulnya kesadaran manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal dengan hak asasi manusia.

Hak asai manusia hingga saat ini belum ada suatu definisi yang baku dan bersifat otoritatif (mengikat). Berkaitan dengan hal itu, H. Victor Conde sebagaimana dikutip oleh Andrey Sujatmoko,¹⁵ mengatakan bahwa belum ada definisi hak asasi manusia yang diterima secara universal dan otoritatif. Banyak yang mendefinisikannya sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan secara hukum atau hak yang dimiliki oleh manusia berhadapan dengan pemerintahan

¹⁵Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Hukum Humaniter* (Jakarta : Rajawali Pres, 2015), h. 21.

negara sebagai perlindungan terhadap martabat manusia yang bersifat melekat dari manusia.

Definisi hak asasi manusia lainnya yang telah dikenal yaitu, hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.¹⁶

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa esensi hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat universal, mengingat sifatnya yang inheren dalam diri manusia. Konsekuensi dari hal tersebut karena hak asasi manusia adalah karunia Tuhan dan bukan pemberian dari orang atau penguasa, dengan itu hak-hak yang dimiliki tidak bisa dicabut atau dirampas oleh orang atau penguasa.

Jadi HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Olehnya itu faktor seperti kewarganegaraan, kelamin, agama, budaya, ataupun bahasa yang berbeda-beda tidak bisa menegaskan keberadaan hak asasi manusia pada diri setiap manusia.¹⁷

Walaupun beberapa pakar dapat merunut konsep hak asasi manusia yang sederhana sampai pada filsafat Stoika di zaman kuno lewat yurisprudensi hukum kodrat Grotius dan ius naturale dari undang-undang Romawi, tampak jelas bahwa asal usul konsep HAM yang modern dapat dijumpai dalam revolusi Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke 17 dan Ke 18.

¹⁶Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 6.

¹⁷Rhona K. M. Simth, Suparman Marzuki, Fadillah Agus, dll, *Hukum Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM-UII, 2008), h. 11.

Dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika Serikat dan Perancis telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi liberal dimana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otoritarianisme yang melekat pada negara. Hal penting mengenai hak-hak yang diproteksi itu adalah hak-hak ini bersifat individualistik dan membebaskan. Hak-hak ini didominasi dengan kata-kata bebas dari dan bukan berhak atas. Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organ-organ negara. Hak-hak yang dicirikan dengan kata-kata berhak atas kemudian dikenal sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tonggak sejarah pengaturan hak asasi manusia yang bersifat internasional baru dihasilkan tepatnya setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa mengesahkan Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948. Hal ini dilatari oleh hidupnya kembali teori hak-hak kodrat¹⁸ dan akibat dari peristiwa kekejaman sebelum dan pada sat perang dunia yang ke 2.¹⁹Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang didalamnya berisikan katalog HAM yang dibuat berdasarkan kesepakatan internasional.

Kemudian pada tahun 1966 dihasilkan perjanjian internasional yang didalamnya terdapat mekanisme pengawan dan perlindungan hak asasi manusia, yaitu Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural*

¹⁸Peter Davie, *Hak Asasi Manusia Sebagai Bunga Rampai*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994), h. 30.

¹⁹Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1994), h. 40.

Rights/ICESCR). Ketiganya dikenal dengan istilah *the Internasional Bill Of Human Rights*.

2. Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak asasi manusia. Prinsip tersebut menjadikannya sebagai bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Prinsip-prinsip tersebut, yakni prinsip universalitas, pemertaban terhadap manusia, kesetaraan, pelarangan diskriminasi, *indivisibility*, *inalienability*, *interdependency* (saling bergantung), reponsibilitas atau pertanggungjawaban dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak asasi manusia.

Prinsip universalitas adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan moral yang tersebar di seluruh wilayah dunia dan pemerintah termasuk masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia itu ada dan harus dihormati oleh seluruh umat manusia di dunia manapun, tidak tergantung pada wilayah atau bangsa tertentu. Ia berlaku menyeluruh sebagai kodrat ilahiah setiap manusia.

Kedua, prinsip pemertaban terhadap manusia (*human dignity*). Prinsip ini menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain, hidup damai dalam keberagaman yang bisa menghargai satu dengan yang lainnya, serta membangun toleransi sesama manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pluralisme sosial, termasuk di dalamnya keragaman budaya dan hukum-hukum lokal, menjadi identitas peradaban tertentu yang sangat berharga dalam mengemban amanat saling menjaga dan mendorong upaya kebersamaan untuk hidup berdampingan, khususnya manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Allah.

Ketiga, Gagasan mengenai HAM dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan di dalam hak asasi manusia, berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia menjadi tidak setara, karena walaupun begitu tetaplah ia sebagai manusia.

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

Pelarangan terhadap diskriminasi merupakan salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Prinsip ini kenal pula dengan nama prinsip non diskriminasi. Dalam Internasional Bill of Human Rights, yaitu UDHR, ICCPR, maupun ICESCR, prinsip ini telah dimuat secara tegas. Bahkan sebelumnya, hal yang sama juga telah lebih dahulu ditegaskan dalam Piagam PBB (*United Nation Charter*).

Prinsip yang kelima, *indivisibility*. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terkait dengan pandangan yang menyesatkan tentang membedakan atau pengutamaan hak-hak tertentu dibandingkan hak-hak lain. Hak sipil dan politik, sangat tidak mungkin dipisahkan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, karena keduanya satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Keenam, *inalienability*. Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dirampas, atau dipertukarkan dengan hal tertentu, agar

hak-hak tersebut bisa dikecualikan. Misalnya, hak pilih dalam pemilu, tidak bisa dihilangkan hanya dengan dibeli oleh orang yang mampu dan kemudian menggantikan posisi hak pilih. Atau juga hak atas kehidupan yang layak tidak bisa dipertukarkan dengan perbudakan, meskipun dibayar atau diupahi. Manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak asasi tidak bisa dilepaskan dari hak-hak tersebut.

Prinsip yang ketujuh, *responsibilitas* atau pertanggungjawaban (*responsibility*). Prinsip pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia ini ditegaskan bahwa perlunya mengambil langkah atau tindakan tertentu untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia, serta mengaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memkasimalkan sumber daya yang ada untuk memajukkannya.

Pertanggungjawaban ini menekankan peran negara sebagai bagian dari organ politik kekuasaan yang harus memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Termasuk mempetanggungjawabkan setiap langkah atau tindakan yang diambil sebagai kebijakan tertentu dan memiliki pengaruh terhadap kelangsungan hak-hak rakyat. Peran negara menjadi vital bukan soal mengambil tindakan apapun (*by omission*). Unsur pertanggungjawaban adalah bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip hak asasi manusia agar bisa terwujud.

Prinsip kewajiban positif negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum hak asasi manusia internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang hak asasi manusia sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia setiap individu.

Prinsip-prinsip tersebut, merupakan hal yang mendasar untuk mengkaji hak asasi manusia, baik terhadap tekstualitas maupun kontekstualitasnya dalam pengertian untuk mempelajari sejarahnya, instrumen hukum dan praktek implementasinya di lapangan.

3. HAM di Indonesia

Wacana hak asasi manusia bukanlah sesuatu hal yang baru dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Indonesia. Pada saat konstitusi atau UUD 1945 akan disusun, konsep tentang hak asasi manusia sudah menjadi objek pembahasan yang harus dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi atau UUD 1945. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya hak asasi manusia untuk di jadikan sebagai dasar dalam bernegara.

Walaupun dalam pembahasan itu terjadi perdebatan, dimana Supomo menganggap negara tidak perlu menjamin hak asasi manusia karena dianggap berlebihan, berdampak negatif dan hak-hak individu selalu berada dibawah kepentingan bersama. Ini berdasar pada pandangannya tentang negara integralistik yang dimaknai sebagai negara atau bangsa yang teratur, sebagai bangsa yang persatuan rakyat tersusun maka tidak adanya perbedaan antara individu dan negara. Negara merupakan suatu masyarakat yang bersatu dengan tidak mementingkan perseorangan dan mengatasi semua golongan, persatuan yang berdasarkan kekeluargaan.

Begitu juga dengan Soekarno, menolak untuk dimasukkan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi atau UUD 1945, menurutnya, hak asasi manusia berdampak negatif disebabkan berkaitan dengan paham individu. Soekarno menyatakan, jika negara dibangun dengan paham individu dan liberal

maka akan terjadi pertikaian antar sesama manusia. Pandangan Soekarno dan Supomo berkecendrungan pada paham kolektivitas dan menunjukkan sentiman anti barat.

Berbeda dengan Soekarno dan Supomo Hatta dan Yamin berpendapat sebaliknya. Mereka menyadari akan pentingnya hak asasi manusia dicantumkan dalam pasal-pasal konstitusi sebagai jaminan warga negara dan khawatir jika tidak dicantumkan, maka negara akan mengarah kepada bahaya otoritarian.

Perdebatan-perdebatan itulah, yang pada akhirnya penyusunan konstitusi atau UUD 1945 berakhir dengan kompromi. Menurut Marzuki, ada tiga poin penting yang menjadi catatan dari perdebatan tersebut. Pertama, hak asasi manusia yang masuk dalam UUD 1945 dicurigai sebagai paham individualistik yang berasal dari barat. Kedua, pasal-pasal tentang hak asasi manusia yang dicantumkan dalam UUD 1945 sangat terbatas. Keterbatasannya tidak hanya di maknai bahwa hak tersebut akan diatur oleh undang-undang, tetapi dalam arti konseptual pula. Konsep hak asasi manusia yang digunakan disepadankan dengan konsep Hak Warga Negara. Ketiga Soekarno yang kemudian menjadi Presiden Indonesia pertama, sejak awal kurang memiliki komitmen dasar yang jelas dan tegas untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak asasi manusia.²⁰

Keadaan hak asasi manusia di Indonesia makin lebih buruk ketika era Orde Baru. Di era Soeharto semakin mengekang hak berserikat, berekspresi dan berpendapat, melakukan kebijakan dengan mengeliminasi dan mereduksi konsep-konsep hak asasi manusia serta melakukan pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa tanpa alasan hukum.

²⁰Suparman Marzuki, *Tragedi Politik Hukum HAM* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), h. 187.

Barulah disaat periode reformasi, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan baik dalam rangka penyusunan ataupun penetepannya bersahabat dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah dituangkan didalam konstitusi atau UUD 1945 dengan terjadinya beberapa perubahan atau amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai 2000. Hak asasi manusia dimuat secara tegas dalam bab tersendiri yaitu Bab XA mulai dari pasal 28A sampail 28J. Salah satu penegasan konsep HAM ini dapat dibaca Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.²¹

Selain dari itu lahir berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Di antaranya UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendehkan Martabat Manusia. Dasar pertimbangannya untuk mencegah dan mengakhiri segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusiawi.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.

UU No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *International Labour Organization* (ILO) Konvesnsi ILO mengenai penghapusan kerja. UU No. 29

²¹Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2016), h. 14.

Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Pertimbangan dikeluarkannya UU ini untuk meningkatkan perlindungan hukum yang lebih efektif sehingga dapat lebih menjamin hak-hak setiap warga negara untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. UU ini hadir sebagai instrumen penting untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia.

UU No. 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. UU. No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik. Pertimbangan disahkannya kedua kovenan tersebut merupakan kesadaran bagi pemerintah akan arti penting kedua konvenan tersebut bagi penghormatan dan perlindungan HAM sekaligus kesadaran bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional.

Didalam hukum acara pidana sendiri telah menjabarkan secara rinci dasar-dasar perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana yang dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasmi Manusia, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Pancasila ataupun UUD 1945. Selain dari itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mempertegas beberapa hak-hak seorang tersangka atau terdakwa seperti yang telah diatur dal Bab VI pada Pasal 50 dampai dengan Pasal 68.²²

B. *Hak-Hak Tersangka dalam KUHP*

Secara sepintas, sudah sering dibicarakan tentang kedudukan tersangka dalam KUHP. Tersangka mengambil tempat secara khusus yang dibicarakan

²²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, h. 72.

dalam satu bab di dalam KUHAP yang bersamaan dengan terdakwa yakni dalam Bab VI. Pengertian tersangka sendiri, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 14 ialah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dari penjelasan tersebut, seorang tersangka ialah orang yang diduga telah melakukan tindakan pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata sesuai fakta. Olehnya itu seorang tersangka harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dalam proses itu jika diperlukan, seorang tersangka dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun upaya penyitaan terhadap benda yang dimilikinya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menghindari cara-cara pemeriksaan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seorang tersangka. Pemeriksaan terhadap seorang tersangka harus dilakukan dengan pendekatan sistem akuisitor. Pemeriksaan yang tidak melihat seorang tersangka sebagai objek pemeriksaan yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh aparat penegak hukum seperti cara-cara pemeriksaan yang dilakukan di masa lalu (pendekatan inkuisitur).

Sebagaimana yang dijabarkan dalam UUD 1945, pada Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Hal itu pula dijabarkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain dimuat dalam penjelasan umum KUHAP sebagaimana tercantum pada butir 3 huruf C yang berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya memperoleh kekuatan hukum tetap.²³

Pernyataan tersebut dikenal dengan asas praduga tidak bersalah. Berdasarkan asas itu pula dan asas-asas lain yang terkandung dalam KUHAP, maka, diatur tentang ketentuan pemeriksaan seorang tersangka ditempatkan sebagai objek bukan objek pemeriksaan dan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaannya.

Mengenai ketentuan tentang hak-hak tersangka tersebut KUHAP telah menjabarkannya sebagai berikut:

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan
Penjabarannya dipertegas didalam Pasal 50 KUHAP terkait dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik.
2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang bisa dimengerti terkait apa yang disangkakan kepadanya. Hak ini di atur dalam Pasal 51 poin (a) KUHAP sebagai hak seorang tersangka untuk mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.
3. Berhak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.²⁴
Hak untuk memberikan keterangan secara dan tanpa tekanan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap oleh seorang

²³Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 43.

²⁴Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana* (Jakarta : Ghalia Indonesia. 1996), h. 35.

tersangka paling menguntungkan baginya. Ketentuan Pasal 52 KUHP ini untuk menjamin seorang tersangka terhindar dari pemerasan pengakuan yang dilakukan oleh penyidik, tetapi hal demikian akan hanya menjadi cita-cita belaka jika penyidik atau aparat penegak hukum masih memiliki mentalitas pemeriksaan dengan pendekatan inkuisitur.

Hanya saja tentang hak ini pada saat persidangan, jika terdakwa tidak mau/diam/tidak mau bicara, beberapa pakar berpendapat bahwa terdakwa yang tidak mau menjawab pertanyaan akan diambil kesimpulan yang merugikan baginya. Hal itu diutarakan Wirjono Prodjodikoro:

“Kalau seorang terdakwa tidak mau menjawab suatu pertanyaan, biasanya hakim mengambil kesimpulan dari hal tidak mau menjawab itu, yang tidak menguntungkan terdakwa. Sebab seorang yang suci hatinya, biasanya tidak keberatan untuk menjawab pertanyaan apapun juga, kecuali apabila pertanyaan mengenai hal yang sama sekali tidak tersangkut paut dengan perkara pidana yang sedang diperiksa atau apabila pertanyaan itu adalah bertentangan dengan kesopanan atau kesusilaan”.²⁵

4. Berhak untuk mendapat juru bahasa

Hak mendapat juru bahasa berlaku dalam setiap pemeriksaan baik pada pemeriksaan penyidikan maupun dalam sidang pengadilan. Adalah suatu hal yang tidak mungkin bagi seorang tersangka ataupun terdakwa untuk membela kepentingannya, jika terhadap dirinya diajukan dan dituduhkan sangkaan yang tidak dimengerti olehnya.

²⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung : Sumur Bandung, 1962), h. 27.

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum

Hak diatur dalam Pasal 54. Untuk membela kepentingan dirinya, seorang tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, hal itu mulai sejak di awal pemeriksaan penyidikan. Hanya saja ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 115, menurut Harahap²⁶, terdapat kelemahan.

Kelemahan itu terdiri dari dua segi, segi pertama dari sisi kualitas, bahwa hak tersebut baru bersifat hak dan tidak bersifat wajib. Berarti mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan tergantung kepada tersangka atau terdakwa mempergunakannya atau tidak. Akibatnya jika proses pemeriksaan tidak didampingi oleh penasihat hukum tidak menggugurkan proses pemeriksaan.

Kedua, proses pemeriksaan oleh penyidik untuk didampingi oleh penasihat hukum bersifat pasif. Kedudukan dan kehadiran seorang penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidik hanya terbatas pada melihat atau menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan, alias kehadiran seorang penasehat hukum hanya sekedar penonton.

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut akan berubah sifatnya menjadi wajib ketika tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka diancam dengan pidana hukuman 15 tahun atau lebih dan diancam dengan pidana hukuman mati. Dalam ancaman hukuman tersebut, seorang tersangka tidak diharuskan mampu untuk membiayai penasehat hukum.

²⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, h. 333.

Jika mampu menyediakan dan membiayai penasehat hukum, tersangka bisa memilih penasehat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak, maka menjadi suatu kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hukumnya.

Kewajiban penyidik untuk menunjuk penasehat hukum untuk tersangka didasarkan pada ketentuan bahwa tersangka tidak mampu menyediakan secara sendiri penasehat hukumnya dan seorang tersangka disangkakan dengan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih.

Kewajiban pertama didasarkan pada beratnya hukuman yang disangkakan sedangkan kewajiban kedua didasarkan pada dua syarat. Pertama didasarkan pada ketidakmampuan tersangka karena tidak bisa menyediakan penasehat hukum dan kedua didasarkan pada beratnya hukuman yang disangkakan kepada tersangka yakni 5 tahun atau lebih.

Penasehat hukum yang telah ditunjuk oleh penyidik bersifat cuma-cuma, artinya pembiayaan jasa bantuan hukum tidak dibebankan kepada tersangka.

6. Hak menghubungi penasehat hukum

Jika tersangka orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses pemeriksaan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 57 KUHAP.

7. Untuk tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan tersangka baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Terkait dengan ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP.

8. Selama berada dalam penahanan, tersangka berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga. Mengenai hak ini, diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 KUHAP.²⁷

9. Berhak atas surat menyurat.

Diatur dalam Pasal 62. Hak ini diberikan sepenuhnya kepada tersangka yang berada dalam penahanan untuk mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Selain dari itu tersangka berhak atas kebebasan rahasia suratnya, dalam arti tidak boleh diperiksa penyidik, kecuali surat menyurat tersebut diduga disalahgunakan oleh tersangka.

Kalau surat yang diduga berisi penyalahgunaan tersebut akan diperiksa oleh penyidik, maka pemeriksaannya harus diberitahukan kepada tersangka, kemudian dikirim kepada pengirimnya dengan dibubuhi cap telah ditilik.

10. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Hal ini di atur dalam Pasal 63 KUHAP yang berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi atau menerima kunjungan dari rohaniawan”.²⁸

11. Berhak mengajukan saksi yang menguntungkan. Terkait dengan hak ini di atur dalam Pasal 65 KUHAP.²⁹

12. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menanti ganti rugi dan rehabilitasi apabila, penangkapan, penahanan, atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah.³⁰

²⁷Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) h. 141.

²⁸R. Indonesia, *KUHAP Lengkap* (Jakarta : Redaksi Bumi Aksara, 2001), h. 32.

²⁹Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap*, h. 32.

Itulah hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP yang diberikan sejak berlangsungnya proses pemeriksaan penyidikan. Tujuannya untuk tegaknya kepastian hukum dan memberi rasa perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka begitu juga harkat dan martabatnya.

Terkait dengan hak-hak tersangka sebagaimana yang diutarakan di atas, Wirjono Prodjodikoro memberi harapan pada saat disahkannya UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) pada tanggal 31 Desember 1981 selaku Ketua Mahkamah Agung RI, berkata:

Sekiranya sudah terang, bahwa dalam negara Indonesia juga berhubung dengan adanya suatu sila dari Pancasila yang merupakan Peri Kemanusiaan, harus dalam melakukan kewajibannya pejabat-pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai subjek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.³¹

C. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 1, penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³² Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³³

³⁰Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, h. 338.

³¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, h. 16.

³²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 80.

³³Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap*, h. 5.

Pada tindakan penyidikan, penekanannya dititik beratkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti agar tindak pidana yang ditemukan bisa menjadi jelas, dengan dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Ketentuan mengenai alat-alat penyidikan
- b. Ketentuan mengenai telah diketahui terjadinya perbuatan tindak pidana (delik)
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka/terdakwa
- e. Penahanan sementara
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan/interogasi
- h. Berita acara (pemeriksaan ditempat, penggeledahan dan interogasi)
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pembembaliannya ke penyidik jika masih diperlukn untuk penyempurnaan.

Olehnya itu jika diperiksa ketentuan Pasal 7 ayat (1), apalagi jika dihubungkan dengan beberapa bab di dalam KUHAP, seperti Bab V (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat) serta Bab IX (penyidikan), maka ruang lingkup wewenang dan kewajiban penyidik adalah begitu luas. Hanya saja, dalam penguraianya di dalam KUHAP tidak tersistematis, sehingga memahami ketentuan tentang penyidikan secara

³⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000), h. 118.

sempurna tidak bisa melihatnya hanya pada salah satu bab saja di dalam KUHAP, tetapi dengan melihat dan mengumpulkannya dari bab-bab lainnya.

Diatas sudah dijelaskan siapa yang disebut dengan penyidik, pertama, pejabat polisi negara Republik Indonesia dan kedua pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.³⁵Selain dari itu pada Pasal 10 KUHAP juga mengatur penyidik pembantu.

1. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, menyebutkan kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat Polisi. Dari segi perbedaan fungsional, KUHAP, telah mengatur tanggung jawab fungsi penyidik kepada institusi kepolisian. Hanya saja untuk menjadi seorang pejabat kepolisian yang diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2).

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), syarat kepangkatan tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) dengan syarat kepangkatan akan diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim diperadilan umum. Olehnya itu, ketentuan penjelasan Pasal 6 KUHAP, memberi petunjuk untuk menetapkan kepangkatan penyidik, akan disesuaikan dengan kepangkatan jaksa/penuntut umum dan hakim.

Menurut Pasal 2A PPNo. 5 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa syarat calon kepangkatan dan pengangkatan penyidik kepolisian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 81.

1. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dengan pendidikan paling rendah sarjana strata 1 atau yang setara.
2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
3. Sehat jasmani, rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
4. Memiliki kemampuan serta integritas moral yang tinggi.

Dalam kebutuhan penyidikan menghendaki, dapat diangkat penyidik pembantu. Pasal 10 KUHAP, penyidik pembantu merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan kepangkatan tertentu dan terkait dengan syarat kepangkatannya akan di dengan peraturan pemerintah.³⁶

Didalam Pasal 3 PP 58 Tahun 2010, terhadap penyidik pembantu dari unsur kepolisian, selain memiliki kepangkatan serendah-rendahnya brigadir dua polisi, juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal.
2. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
4. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.³⁷

Penyidik pembantu tidak mesti dari anggota Polisi Negara Republik Indonesia, tetapi juga bisa dari kalangan pegawai sipil di instansi Polisi Negara

³⁶Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap*, h. 12.

³⁷Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 210

Republik Indonesia, hal ini disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dalam bidangnya. Seperti ahli patologi, kimia dan lain sebagainya. Sebab kalangan kepolisian keahlian yang demikian masih sangat terbatas.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Sejalan dengan perubahan terhadap syarat untuk diangkat sebagai calon penyidik Polri, menurut Pasal 3A PP No. 58 Tahun 2010, untuk diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), calon penyidik harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 tahun.
2. Berpangkat paling rendah golongan III/a atau penata muda
3. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
5. Bertugas dibidang operasional penegakkan hukum.
6. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
7. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.³⁸

Tetapi perlu diketahui bahwa, kewenangan yang miliki oleh PPNS terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus yang menjadi dasar kewenangannya hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa PPNS sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1)

³⁸Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, h. 211.

huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang telah mejadi landasan hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

PPNS tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidanya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).

Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3)). Sebelum penyidik Polri meneruskan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai sipil kepada penuntut umum, penyidik Polri berwenang untuk memeriksa segala kekurangan yang dilakukan penyidik pegawai sipil. Hal ini didasarkan pada kedudukan yang diberikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) kepada penyidik Polri sebagai koordinator dan pengawas terhadap penyidik pegawai negeri sipil.

Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3)). Tentang masalah pemberitahuan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, terdapat hal yang kurang sejalan dalam pemberitahuan tindakan penyidikan yang dilakukannya. Pada pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepda penuntut umum.

Hal ini dikarenakan, penyidik polri yang berkewajiban untuk menyampaikan kepada penuntut umum. Lain halnya dengan penghentian penyidikan, disamping harus diberitahukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penyidik Polri, juga langsung memberitahukan kepada penuntut umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat perskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polsek Panakkukang, Kota Makassar. Pemilihan tempat ini didasarkan dengan pertimbangan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis yang melihat bahwa lokasi penelitian ini akan membantu dan menjawab rumusan masalah yang penulis angkat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan skripsi ini.⁴⁰ Kemudian ditunjang dengan pendekatan penelitian lapangan yang menjadi objek permasalahan skripsi ini yaitu dengan wawancara pada

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta : UI-PRESS, 1982), h.10.

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 133.

Kantor Polisi Sektor Panakkukang, guna mendapatkan pendapat-pendapat untuk menunjang penelitian ini.

C. Sumber Data

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Polisi Sektor Panakkukang dengan cara interview yaitu kegiatan yang terjun langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, mencakup buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif. Suatu proses penelitian yang membutuhkan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan untuk menghimpun data sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran penelitian.

2. Wawancara, yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau pengumpulan data secara tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi guna mendapatkan keterangan. Dalam hal ini penulis mewawancarai penyidik Polsek Panakkukang, tersangka, serta advokat atau lembaga bantuan hukum.
3. Studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan menelaah data dari dokumen (buku, jurnal, teori) dari peneliti lain yang ada hubungannya dengan hak tersangka.

E. Instrumen Penelitian

Agar data hasil penelitian mempunyai kualitas yang baik maka instrumen penelitian perlu diperhatikan secara cermat, sebab kualitas data penelitian sangat ditentukan oleh instrumen penelitian.

Adapun instrumen penelitiannya adalah peneliti melakukan wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelum melaksanakan penelitian. Dibuat dalam suatu daftar pertanyaan yang terstruktur dan berdasarkan pokok-pokok yang diperlukan dalam wawancara. Pedoman ini diperlukan sebagai instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari informan, kemudian informasi atau data yang diperoleh tersebut dicatat dibuku catatan atau direkam dengan menggunakan alat perekam yang telah disiapkan oleh peneliti.⁴¹

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Kedua*, h. 24-26.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Identifikasi data adalah dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- b. Koding data adalah proses untuk mengklasifikasi jawaban-jawaban menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.
- c. Proses pemeriksaan data hasil penelitian yang biasa dikenal dengan editing, tujuannya untuk mengetahui keterkaitan dan kebenaran data dalam menjawab pokok masalahnya. Tujuannya agar diperoleh sebuah data yang faktual dan tentunya berkualitas. Hal itu akan semakin mudah jika ditunjang dengan hasil bacaan-bacaan dari literatur yang sama dengan objek penelitian ataupun yang lainnya.

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data yang sudah diperoleh melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen, selanjutnya melalui proses seleksi data (memilah-milah), disajikanlah sebuah data yang telah diverifikasi ke dalam model susunan informasi. Setelah itu melakukan kesimpulan-kesimpulan dari hasil temuan yang telah diperoleh dan diperkuat dengan basis teori-teori yang telah digunakan dalam proses penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji tentang keabsahan data dari hasil penelitian dapat kita amati dalam keterkaitan antara pokok masalah yang telah ditentukan dengan hasil dari jawaban pada saat melakukan wawancara.

Untuk memenuhi itu maka, sikap ketekunan dari seorang peneliti sangat diperlukan. Ditunjang dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk menambah kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.



BAB IV

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERSANGKA PADA TINGKAT PEMERIKSAAN DI POLSEK PANAKKUKANG

A. Pengaturan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang.

Pengaturan hak tersangka dalam proses pemeriksaan atau penyidikan di Kepolisian pada dasarnya diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas tentang hak-hak tersangka di Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Indra Raden, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Kalau periksa tersangka hanya berpatokan pada KUHAP, untuk memahmi kasusnya di KUHP. Kalaupun harus harus merujuk pada undang-undang lain, itu kasus yang ditangani misalnya kasus anak, maka harus pakai undang-undang anak, atau KDRT”⁴²

Adapun hak-hak tersangka tersebut menurut KUHAP adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan, hak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang bisa dimengerti terkait apa yang disangkakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapat bantuan hukum dan hak untuk menghubungi penasehat hukumnya.

⁴² Indra Raden, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

Selain dari itu, tersangka juga berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan tersangka baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak, berhak menghubungi pihak keluarga dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga, hak atas surat menyurat, berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, berhak mengajukan saksi yang menguntungkan dan berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Jaminan terhadap hak-hak tersangka tersebut juga di cantumkan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jaminan tersebut diantaranya, penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innoince*), tercantum dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004.

Jaminan hak-hak tersangka juga tertuang dalam BAB III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian ke empat memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17 dan 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 17, berbunyi :

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap perbuatan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapat bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hak-hak tersebut juga dipertegas dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (*Internasional Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi pada 28 Oktober 2005 melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Di antaranya ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat 2 dan 3.

Pasal 14 ayat 2 berbunyi :

Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.

Pasal 14 ayat 3 berbunyi :

Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:

- (a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengerti, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
- (b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya;
- (d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
- (e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-

saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;

- (f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- (g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

Dalam kovenan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi melalui UU No. Tahun 1998 ketentuan terkait perlindungan hak-hak tersangka diantaranya diatur dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap Negara Pihak harus mencegah, diwilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apabila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat public atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Abdul Azis Dumpa, selaku pengacara publik LBH Makassar mengatakan bahwa:

“Memang hak-hak tersangka itu pada dasarnya diatur didalam KUHAP, tetapi harus dipahami bahwa selain KUHAP, jaminan hak-hak tersangka

juga tertuang dalam DUHAM, Miranda Rule's, kovenan hak-hak Sipil (Sipil dan Politik) begitu juga kovenan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang juga telah diratifikasi Indonesia, UUD 1945, UU HAM.⁴³

Selain UU yang telah disebut dan dijelaskan diatas, ada juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pada dasarnya mengamanatkan dalam Bab V tentang Pembinaan Profesi. Turunan dalam UU Kepolisian tersebut di antaranya adalah Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik.

Dalam Perkap No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, khususnya dalam Pasal 7 telah dijelaskan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang diantaranya, bertutur kata kasar dan bernada kemarahan, menyalahi atau menyimpang dari prosedur tugas, atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pada Perkap No. 8 Tahun 2009, dalam Pasal 11 ayat (1) telah ditegaskan bahwa setiap petugas atau anggota Polri, misalnya dilarang melakukan penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasar hukum, melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap terhadap orang yang disangka terlibat dalam dalam kejahatan, penghukuman atau perlakuan yang tidak yang manusiawi, menggunakan kekerasan atau senjata api yang berlebihan.

⁴³ Abdul Aziz Dumpa, Pengacara Publik LBH Makassar. *Wawanca*, LBH Makassar 9 Maret 2020

B. Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang.

Sebagaimana dijelaskan di atas, KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas tentang hak-hak tersangka yang di atur di Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

1. Pasal 50, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan.

Pasal 50 KUHAP mengamanatkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan segera, agar status tersangka yang dikenakan penahanan menjadi jelas. Tujuannya agar adanya kepastian hukum bagi tersangka, untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katung nasib orang yang disangka dan jangan sampai terjadi adanya perlakuan yang sewenang-wenang dan ketidakwajaran. Ketentuan tersebut untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Indra Raden, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Pemeriksaan tersangka dilakukan dengan cepat, kalau begal misalnya ditangkap malam itu juga diperiksa kalau sudah tiba di kantor. Kalau tiba subuh, subuh itu juga diperiksa.”⁴⁴

Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Apa arti segera undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut. Akan tetapi, dari pengertian bahasa barangkali secepat mungkin atau sekarang juga tanpa menunggu lebih lama. Sungguh sesuatu ketentuan yang sangat ideal apa yang hendak dicapai Pasal 50 KUHAP tersebut, namun masih dapat dipertanyakan apakah secepat mungkin atau sekarang juga tanpa menunggu lama jika seorang tindak pidana begal yang

⁴⁴ Indra Raden, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

ditangkap pada malam dan subuh hari itu harus dilakukan pemeriksaan pada saat itu pula tanpa memperhatikan kondisi fisik dari yang diperiksa dan yang akan memeriksa. Tentu ini menjadi celah untuk terabainya hak-hak dari seorang tersangka yang akan diperiksa oleh penyidik dan praktiknya menjadi tidak wajar. Kewajaran yang dimaksud mengenai penggunaan waktu, misalnya waktu subuh. Sebaiknya hal itu dilakukan pada saat kerja kantor dan kondisi tubuh yang seharusnya tidak sedang membuntuhkan untuk istirahat.

2. Pasal 51, Hak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti terhadap tindak pidana yang disangkakannya.

Pada saat proses pemeriksaan pada umumnya penyidik menggunakan bahasa Indonesia dengan pilihan kata-kata yang mudah dipahami oleh tersangka sedangkan penggunaan bahasa daerah biasanya hanya digunakan dalam proses pemeriksaan bagi tersangka jika penyidik dan tersangka berasal dari daerah yang sama. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi tersangka dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Indra Raden, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Kita pakai bahasa Indonesia, bahasa resmi itu. Kalau pakai bahasa daerah disini jarang, karena saya juga bukan asli dari Makassar, saya dari Jawa. Disini juga kalau tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak ada, disinikan sudah daerah kota.”⁴⁵

⁴⁵ Indra Raden, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

3. Pasal 52, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan.

Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan S, selaku tersangka mengatakan bahwa:

“Waktu saya diperiksa dulu, itu dibentak-bentak, terkadang juga dipukuli, tetapi lebih parah dari itu waktu saya ditangkap dan mau dibawa ke kantor Polisi. Jadi saya sebelum dibawa ke kantor Polisi, dibawa dulu ke pasar Todopuli, disana saya diikat tanganku dan mata ditutupi setelah itu disuruh jalan lalu ditembak kakiku.”⁴⁶

Dari Kesaksian S tersebut, kita dapat menilai masih adanya praktik-praktik ketidakprofesionalan penyidik dalam memeriksa seorang tersangka. Tersangka masih dinilai sebagai objek pemeriksaan, bukan sebagai subjek dan tentu tujuan pemeriksaannya diarahkan kepada manusianya bukan kepada perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Hal demikian merupakan salah satu pengingkaran aparat penyidik untuk menegakkan prinsip hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Praktik-praktik demikian dilakukan oleh aparat penyidik dalam proses pemeriksaan dengan harapan agar keterangan dari tersangka dapat memberikan titik terang atas kasus yang disangkakan kepada tersangka dan merupakan praktik

⁴⁶ S, Tersangka Polsek Panakkukang. Wawancara, Polsek Panakkukang, 9 Maret 2020

yang mudah bagi penyidik untuk memperoleh pengakuan dari tersangka tanpa memandang perlu bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan mengganggu hukum sebagai cita-cita dari negara hukum dan hak asasi manusia.

Selain praktik tersebut sangat mudah dilakukan untuk memperoleh pengakuan, mengenai jaminan pelaksanaan, ketentuan tersebut tidak ada sangksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan tersebut ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Akan tetapi hal ini kurang efektif, karena sangat sulit bagi seorang tersangka membuktikan keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan atau tekanan.

Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan. Tapi oleh karena Pasal 115 hanya bersifat fakultatif, peran pengawasan yang diharapkan dari penasihat hukum dalam acara pemeriksaan sangat terbatas dan semata-mata sangat tergantung dari pejabat penyidik untuk memperbolehkan atau mengizinkannya. Selain dari itu control tersebut dapat implementatif harus ditunjang dengan pemahaman hukum seorang tersangka dalam memahami hak-haknya.

Jika keterangan yang diberikan tersangka dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksaan, maka keterangan yang diperoleh dengan cara demikian merupakan keterangan yang tidak sah. Cara yang dapat ditempuh untuk menyatakan tidak sah, dengan jalan mengajukan Praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya.

Tentu, jalan itu harus ditempuh dengan kerumitan-kerumitan yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Pasal 53, Hak untuk mendapat juru bahasa.

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan atau proses pemeriksaan.

Tersangka yang dianggap perlu untuk mendapatkan juru bahasa ialah tersangka orang asing, orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia dan orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Indra Raden, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Selama saya menjadi penyidik satu tahun lebih, saya belum menangani tersangka orang asing, karena kalau tersangkanya orang asing melakukan tindak pidana disini (wilayah Polsek Panakkukang) langsung dilimpahkan ke Polrestabes Makassar, kalau orang tidak paham bahasa Indonesia, saya juga belum dapat karena mungkin disini wilayahnya sudah masuk daerah kota, begitu juga orang yang buta dan tuli yang tidak bisa menulis, saya belum menangani tersangka tersebut”⁴⁷

5. Pasal 54, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Penyidik akan berkewajiban menunjuk seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka jika tindak pidana yang disangkakannya diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga akan berubah sifatnya menjadi wajib ketika tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tersangka yang diancam dengan pidana hukuman 15 tahun atau

⁴⁷ Indra Raden, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

lebih dan diancam dengan pidana hukuman mati. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman demikian, maka tidak ada alasan bagi penyidik untuk tidak menyediakan penasehat hukum bagi tersangka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Indra Raden, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Semua tersangka boleh didampingi pengacara, itu diatur dalam KUHAP. Namun pada saat pemeriksaan ditanya, mau didampingi pengacara atau tidak? Kebanyakan yang saya periksa menolak untuk didampingi pengacara, karena mungkin tidak ada uangnya. Misalnya saya periksa kasus pencurian, mau ambil pengacara untuk apa? Dia dibela untuk apanya. Kalau untuk yang wajib mendapat pengacara juga ditanya, mau didampingi pengacara atau tidak? Kebanyakan tidak, menolak untuk didampingi, nanti kalau dipengadilan mau didampingi pengacara tergantung dari tersangka saja.”⁴⁸

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ikbal Usman AQ, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Tersangka yang diancam 15 tahun penjara, seumur hidup atau pidana mati wajib didampingi penasihat hukum, kalau tersangka tidak mampu maka wajib ditunjukkan seorang penasihat hukum gratis dari Pusbakum (Pusat Bantuan Hukum) di Pengadilan Negeri tetapi perlu waktu dan berkas untuk mendapat bantuan hukum, namun tetap banyak yang menolak bantuan hukum makanya dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi penasehat hukum karena tersangkanya yang minta.”⁴⁹

Sekilas, kewajiban penyidik untuk memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau beberapa orang penasihat hukum sudah dipenuhi. Tapi jika dicermati dengan adanya dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum karena tersangka yang meminta dan alasan penyidik yang memerlukan waktu dalam pengurusanannya untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka,

⁴⁸ Indra Raden, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

⁴⁹ Ikbal Usman AQ, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

menjadi mengaburkan kewajiban penyidik untuk memenuhi kewajibannya dalam ketentuan Pasal 54 KUHAP tersebut.

Hal tersebut terjadi paling tidak didasari dua hal, pertama karena ketidakpahaman seorang tersangka akan hukum dan hak-haknya, kedua, akibat dari ketidakpahaman tersebut dan ditopang oleh mentalitas aparat yang menekankan praktik pada jalan pintas, ketidaktahuan itu menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk memanfaatkannya. Seharusnya ketentuan tersebut, penyidik tidak semata-mata memaknainya hak dari tersangka, tetapi telah berubah sifatnya menjadi kewajiban penyidik.

Akses bantuan hukum ini selain diatur dalam KUHAP juga diperkuat oleh kewajiban pro bono advokat yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penyediaan anggaran bantuan hukum oleh Negara sebagaimana disinggung dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

Dukungan terhadap bantuan hukum itu juga datang dari lingkungan peradilan, sebagai pilar pemberian bantuan hukum pro deo. Meskipun hakim acapkali mengabaikan keberatan atau klaim terdakwa tidak disediakan pengacara, walaupun Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa hak tersangka harus dipenuhi sejak masa penyidikan.

Beberapa putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum berakibat pada batal atau cacatnya surat dakwaan tersebut. Di antaranya:

1. Putusan MA NO. 367K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998. Kaidah hukumnya bila tidak didampingi penasihat hukum ditingkat penyidikan

maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntutan oleh penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima walaupun di sidang pengadilan di damping penasihat hukum.

2. Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2012. Kaidah hukumnya proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, padahal terdakwa diancam pidana di atas lima tahun. Permohonan kasasi terdakwa Ariel Haryanto dikabulkan majelis dan akhirnya membebaskan terdakwa.
3. Putusan MA No. 650K/Pid.Sus/2011 tanggal 5 April 2011. Terdakwa dalam kasus ini M. Imam Mubarak mengajukan kasasi dengan menggunakan tiadanya penasihat hukum sebagai salah satu alasan kasasi. Penyidik meminta tersangka menandatangani pernyataan tidak ingin didampingi penasihat hukum. Kaidah hukumnya tidak disediakan penasihat hukum tergantung kesediaan advokat sebagaimana penjelasan 56 ayat (1) KUHAP.

Jika berdasarkan 3 putusan MA di atas maka tersangka S yang diancam dengan hukum 12 tahun penjara, seharusnya hasil pemeriksaannya yang tertuang dalam BAP penyidik dinyatakan batal demi hukum. Sebagaimana hasil wawancara dengan S, selaku tersangka mengatakan bahwa:

“Waktu diperiksa dulu ditanya untuk didampingi pengacara, tapi karena tidak mampu, dibuatkan surat pernyataan untuk tidak didampingi sama pengacara”⁵⁰

Tentu hal-hal demikian kita sangat berharap kedepan tidak ada lagi kita jumpai dalam proses penegakkan hukum kita dan aparat penyidik ingin berbenah

⁵⁰ S, Tersangka Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang, 9 Maret 2020

dalam menjalankan profesinya dengan menunjukan bahkan meningkat keprofesionalannya tanpa harus ada upaya hukum yang harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa untuk menunjukkan praktik-praktik yang tidak konstitusional, merendahkan martabat manusia, dan tidak berdasarkan hukum tersebut.

6. Pasal 57, Hak menghubungi penasihat hukum.

Bagi mereka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP. Begitu juga penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan penyidikan.

Sehubungan dengan pembicaraan hak tersangka untuk menghubungi penasihat hukumnya, dalam proses pemeriksaan penyidikan Pasal 69 KUHAP bahkan telah memberikan hak kepada penasihat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat tertangkap. Kapan saja penasihat hukum ingin berhubungan dengan tersangka harus diperkenankan. Tentu harus berdasarkan kewajaran, dan dalam hal yang mendesak dan dianggap perlu, dapat dilakukan di luar kewajaran. Kewajaran yang dimaksud terutama penggunaan waktu, misalnya waktu subuh tentu tidak wajar. Lazimnya dalam jam kerja kantor. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap waktu yang dirumuskan dalam Pasal 70 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan Pasal 69 KUHAP harus diartikan waktu jam kerja kantor. Dengan demikian penasihat hukum menghubungi dan berbicara dengan tersangka sebagaimana yang dimaksud Pasal 69 KUHAP begitu juga

Pasal 57 KUHAP, hanya dapat dipergunakan pada waktu jam kantor atau mendesak dan dianggap perlu.

7. Pasal 58, Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter.

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dokter pribadinya guna mendorong tersangka berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahui.

8. Pasal 60 dan 61, Hak menghubungi dan mendapat kunjungan keluarga.

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanannya, sebab saat terjadi penangkapan terhadap tersangka, terkadang lokasi atau tempat kejadiannya jauh dari tempat kediaman tersangka ataupun keluarganya. Pemberitahuan itu diperlukan bagi keluarga agar bisa melakukan upaya atau bantuan yang bisa diberikan kepada tersangka yang ditangkap ataupun yang ditahan. Misalnya saja bisa memberikan bantuan untuk urusan penasihat hukumnya ataupun untuk melakukan kunjungan kepada tersangka atau urusan pekerjaan dan urusan kekeluargaan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ikbal Usman AQ, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Kalau kunjungan keluarga ada jadwal besok, keluarga bisa datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tetapi biasa juga keluarganya datang tidak sesuai jadwal besok, alasannya bawah makanan, rokok, tapi karena datang tidak sesuai jadwal besok, maka kami tidak izinkan untuk ketemu, jadi makanan atau rokoknya saja yang dititip.”⁵¹

⁵¹ Ikbal Usman AQ, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

Sebagaimana hasil wawancara dengan J, selaku tersangka mengatakan bahwa:

“Biasanya keluarga datang, ada juga teman-temanku, ada yang bawah makanan, bawah rokok. Biasa datang siang, karena jam besok juga disini jadwalnya jam satu siangpi.”⁵²

9. Pasal 62, Hak surat menyurat.

Hak ini diberikan sepenuhnya kepada tersangka yang berada dalam penahanan untuk mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya. Selain dari itu tersangka berhak atas kebebasan rahasia suratnya, dalam arti tidak boleh diperiksa penyidik, kecuali surat menyurat tersebut diduga disalahgunakan oleh tersangka.

Kalau surat yang diduga berisi penyalahgunaan tersebut akan diperiksa oleh penyidik, maka pemeriksaannya harus diberitahukan kepada tersangka, kemudian dikirim kepada pengirimnya dengan dibubuhi cap telah ditilik.

10. Pasal 63, Hak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

Dengan ditahannya tersangka maka untuk sementara waktu kemerdekaan atau kebebasannya telah dirampas, menjadikan tersangka terisolasi dengan hubungannya dengan dunia luar yang telah menjadi ritunitas kesehariannya sebelum dilakukan penahanan.

Keadaan tersebut terkadang membuat tersangka menjadi terganggu secara pemikiran dan mental sehingga hak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan menjadi proteksi untuk orang-orang yang memiliki kepercayaan

⁵² J, Tersangka Polsek Panakkukang. Wawancara, Polsek Panakkukang, 9 Maret 2020

terhadap Tuhan, agar dengan dipenuhinya hak tersebut menjadikan seorang tersangka kuat, dapat memberikan kekuatan untuk menghadapi proses hukumnya.

11. Pasal 65, Hak mengajukan saksi yang menguntungkan.

Tersangka berhak untuk melakukan upaya pembelaan terhadap dirinya dengan mengajukan saksi yang menguntungkan dan saksi ahli yang dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi yang menguntungkan dan saksi ahli yang mempunyai bukti kebenaran dan diterima oleh hakim dapat membebaskan atau meringankan dakwaan yang dikenakan pada tersangka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ikbal Usman AQ, selaku penyidik mengatakan bahwa:

“Saksi biasa menjadi kendala, biasa tidak mau memberikan keterangan, tidak mau memberikan kesaksian, karena tidak semua orang yang menyaksikan kejadian bersedia memberikan keterangan atau kesaksian dari apa yang dia lihat.”⁵³

12. Pasal 68, Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia, terkadang penyidik bisa melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dan kesalahan tersebut bisa berupa tidak cukup bukti untuk menjerat tersangka, terjadi salah tangkap atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tersangka berhak atas ganti rugi dan berhak untuk memperoleh rehabilitasi. Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga

⁵³ Ikbal Usman AQ, Penyidik Polsek Panakkukang. *Wawancara*, Polsek Panakkukang 9 Maret 2020

masyarakat menjadi tahu bahwa ia tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Hak tersebut merupakan konsekuensi yang diperoleh oleh tersangka karena kemerdekaannya telah dirampas tanpa dasar hukum yang sah.⁵⁴



⁵⁴ Djoko Prakoso, Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987. h. 23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hak-hak tersangka pada dasarnya memang telah diatur didalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi hak tersangka juga dijamin kedudukannya di dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang turunannya terkait dengan Perkap No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik.
2. Implementasi pemenuhan hak tersangka pada tingkat pemeriksaan di Polisi Sektor Panakkukang belum terpenuhi dengan baik. Masih di jumpai adanya praktik-praktik pemeriksaan yang dilakukan dengan cara-cara yang membentak, terjadi kekerasan fisik, tersangka yang diancam hukuman lima tahun atau lebih tidak mendapatkan penasehat hukum.

B. Saran

1. Mendorong adanya peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tercipta kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Sebab masyarakat yang tinggi kesadaran hak dan kewajiban hukumnya tidak mudah dipermainkan dengan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

2. Perlu adanya peningkatan sikap, mental dan sikap profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang berbasis pada prinsip Hak Asasi Manusia.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara : Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi*. Jakarta: Setara Institute, 2015.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta : UI Press, 1995.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar Ilmu Politik*, Cet. 18; Gramedia Jakarta: 1997.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Davie, Peter. *Hak Asasi Manusia Sebagai Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Negara Hukum*. Malang : Setara Press, 2016.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Marzuki, Suparman, dkk. *Hukum Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008.
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Natsif, Fadli Andi. *Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Natsif, Fadli Andi. "Pancasila dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia," *Jurnal Jurisprudentie*, vol 4 no. 2 (2 Desember 2017). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4057> (Diakses 10 Oktober 2020).
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1962.
- Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap*. Jakarta: Redaksi Bumi Aksara, 2001.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*.

Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia Analisis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 6.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan Kedua. Jakarta: UI-PRESS, 1982.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Surin, Bachtiar dan Adz Dzikra, *Terjemahan & Tafsir*. Bandung: Angkasa, 1987.

UIN Alauddin Makassar. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013



